

BAB II

HUBUNGAN BAIK TURKI DENGAN ISRAEL

Hubungan diplomatik Turki dan Israel sempat mengalami beberapa kali perubahan status diplomatik. Mulai dari terbentuknya kerjasama, pengkuan hingga pemutusan hubungan diplomatik. Bab ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana dinamika hubungan diplomatik antara Turki dan Israel, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan status diplomatik kedua negara berubah-ubah.

A. Politik Luar Negeri Turki

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Turki memiliki keuntungan karena letak geografisnya yang sangat strategis. Oleh sebab itu banyak yang menyebut Turki sebagai negara *bridge country*, karena berada diantara dua benua¹³. Maksud dari Turki sebagai negara *bridge country* adalah karena Turki memiliki sisi ideal dalam hal politik luar negerinya, dikarenakan politik luar negeri Turki yang tidak hanya memandang satu sisi saja, tetapi dari berbagai macam pandangan.

Turki merupakan negara dengan lokasi geografis strategis, yang terletak diantara sisi barat dan timur, dengan kata lain Turki mengadaptasi pandangan Muslim dan juga barat.

¹³ Ahmet Davutoglu, *Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007**, Insight Turkey, Volume 10 No.1, 2008, hal. 80

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa Turki memiliki banyak kesempatan dalam membangun dan menjalankan politik luar negerinya dengan negara-negara di Asia ataupun Eropa. Namun pada kenyataannya, dalam menjalin kerjasama luar negeri, ada banyak dinamika yang mempengaruhi politik luar negeri Turki didalamnya. Termasuk politik luar negeri Turki yang sangat kontroversial dengan Israel. Dimulai pada tahun 2002, Turki sudah memulai untuk menyusun strategi-strategi dalam politik luar negerinya, dan memulai untuk mencari keuntungan dari letak geografisnya, mengingat posisi strategis yang dimiliki Turki.

Ada lima prinsip Turki dalam menjalankan politik luar negerinya. Yang pertama, jika tidak ada keseimbangan antara demokrasi dan keamanan, akan sangat sulit mengembangkan bagi suatu negara dan wilayah disekitarnya. Diperlukannya rasa aman dan nyaman bagi penduduk suatu negara, dengan tidak mengorbankan kebebasan dan hak asasi rakyat. Pada tahun 2002, Turki telah membebaskan segala hak bagi penduduknya, dan menghapuskan segala tekanan didalam negaranya.

. Yang kedua, adanya kebijakan, "*zero problem policy toward Turkey's neighbors*". Kebijakan ini sukses diimplementasi oleh Turki, karena Turki berusaha untuk membangun relasi yang baik antar negara-negara Tetangganya. Seperti hubungan Turki dengan Suriah dan Georgia. Kedua negara tersebut sama-sama bekerjasama dalam hal ekonomi dan transportasi, dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Adanya kerjasama-kerjasama tersebut menjadikan negara tetangga Turki menjadi sangat percaya untuk bekerjasama dengan Turki.

Prinsip yang ketiga adalah, Turki terus berusaha untuk terus mengembangkan serta menambah kerjasama dengan negara-negara disekitarnya. Seperti pada saat permasalahan Bosnia-Herzegovina, Turki aktif dalam ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu menjadi salah satu jembatan untuk Turki hadir di wilayah Eropa. Setelah itu Turki berusaha untuk membangun infrastruktur dalam membantu NATO, negara-negara di Eropa dan negara barat lainnya. Akan tetapi, masih ada sedikit kesulitan bagi Turki untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini karena adanya faktor permasalahan suku Kurdi didalamnya.

Yang keempat adalah, Turki berusaha untuk memperbaiki dan mematuhi multi-dimensi politik luar negeri yang telah dibangun. Misalnya, hubungan politik luar negeri Turki dengan Amerika Serikat, dan juga melalui NATO, proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, pembangunan kerjasama dengan Rusia, dilakukan untuk saling melengkapi, bukan untuk berkompetisi. Hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan kerjasama Turki dengan beberapa negara yang ada disekitarnya.

Prinsip yang kelima adalah, adanya diplomasi berirama yang dilakukan Turki dalam menjalankan politik luar negerinya. Yang dimaksud dari diplomasi berirama Turki adalah, Turki aktif dalam berbagai pertemuan internasional dan mengambil peran inti didalamnya. Sebagai contoh, dalam pertemuan NATO dan OKI, Turki menjadi salah satu negara yang dianggap penting untuk turut serta dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Kemudian pada tahun 2007, Turki memiliki status negara pengamat di kawasan Uni Afrika.

Hal ini terjadi karena Turki memiliki keterbukaan politik luar negeri dengan negara-negara di Afrika¹⁴.

Adapun kebijakan luar negeri Turki yang sudah mulai terbuka dengan negara lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebebasan kepada setiap rakyatnya, membuat Turki memiliki kemajuan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Adanya kegiatan diplomasi yang dimulai sejak tahun 2002 bahkan hingga saat ini, membuat Turki menikmati kondisi negaranya yang banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.

Dalam melaksanakan politik luar negeri, Turki sudah banyak membantu dalam menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasan sekitar Turki. Hal ini yang menyebabkan Turki dipandang sukses dalam melaksanakan politik luar negerinya, hal ini sudah berlangsung semenjak Kerajaan Ottoman. Akan tetapi setelah kekuasaan Ottoman runtuh, Turki kemudian diambil alih pemerintahannya oleh Mustafa Kemal Pasha Attaturk. Attaturk mengubah wajah Turki yang semula merupakan negara Islam, kemudian berubah menjadi negara republik yang berhaluan sekuler. Adapun yang dilakukan oleh Attaturk ini disebut sebagai Kemalisme. Kemalisme ini merupakan perubahan pemahaman anti-USmaniyah dan anti-Islamisme. Banyak yang berasumsi bahwa sebelum adanya pemahaman Islam di Turki, modernisme dan demokrasi merupakan pemahaman awal yang berkembang di Turki.

¹⁴ Ibid

Akan tetapi karena Ottoman masuk menguasai Turki dengan pemahaman Islam, maka pemahaman modern dan demokrasi itu menghilang. Oleh sebab itu, pada rezim Attaturk militer sangatlah mendominasi dalam segala aspek pemerintahan di Turki pada saat itu.

Jika dapat disimpulkan melalui penjelasan sebelumnya, Turki merupakan negara yang sangat fleksibel dan dan rasional dalam menjalankan politik luar negerinya. Hal ini juga sesuai dengan pemahaman Morgenthau mengenai kepentingan nasional suatu negara.

Dapat dimengerti, dari awal pemerintahan pada saat rezim Attaturk wajah Turki dibawa menjadi sangat sekuler dan terkesan mengikuti pemahaman Barat. Hal ini didasari karena setelah runtuhnya kekuasaan Ottoman, pemerintahan Turki yang sebelumnya menganut pandangan Islam, kemudian diubah menjadi sekuler karena dianggap sangat rasional pada saat itu. Akan tetapi, pemahaman sekuler atau barat yang dibawa Attaturk ini banyak tidak disukai oleh warga Turki karena terkesan adanya dominasi militer dan banyak warga Turki yang mengalami tekanan, serta terkesan memaksa atas rezim Attaturk.

Kemudian setelah dari rezim Attaturk, pemerintahan selanjutnya dipegang oleh rezim AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*), yang dipimpin dibawah pemerintahan Erdogan. Pada era AKP, banyak warga Turki yang merasakan kemanan yang sangat tinggi dan berhasil mengubah Turki menjadi lebih sejahtera. Adanya kesan fleksibel yang dibawa oleh Erdogan ini menjadikan Turki harus mengikuti perkembangan dunia yang lebih cepat. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu tujuan untuk Turki dalam menjalankan politik luar negerinya.

Adanya kesan fleksibel dan rasional jika dapat dikorelasi dengan pandangan Morgenthau, politik luar negeri yang dibawa oleh Attaturk dan rezim AKP sama-sama bersifat rasional dan fleksibel. Akan tetapi yang membedakannya hanya pandangan sekuler yang dibawa oleh Attaturk tidak berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan rezim AKP berhasil menjawab keinginan masyarakat terhadap wajah Turki yang baru, dan tidak ada kesan memaksa serta mengalami tekanan.

Dapat diketahui bahwa hingga saat ini, arah politik luar negeri dibawah pemerintahan Erdogan masih berdasarakan kepada membangun relasi sebanyak-banyaknya dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan istilah dalam berdiplomasi bahwa seribu teman terlalu sedikit, dan satu musuh itu sudah terlalu banyak. Akan tetapi, hubungan diplomatik Turki dengan beberapa negara saat ini sedang mengalami kesulitan, terutama dengan Amerika Serikat dan juga dengan negara-negara di Uni Eropa. Turki memainkan peran diplomasi dengan sedikit beresiko dan tidak dapat dimengerti banyak pihak. Kesulitan tersebut ditambah lagi dengan persoalan dalam negeri yang sedikit bergejolak karena permasalahan separatist Kurdi, serta permasalahan kepada rakyat Gaza yang secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Turki sendiri.

Oleh sebab itu, Turki memiliki keinginan untuk segera memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara, termasuk dengan Israel, dalam menyelesaikan permasalahan diplomatik yang ada.¹⁵

B. Dinamika Hubungan Diplomatik Turki dengan Israel

Dinamika hubungan diplomatik Turki dengan Israel jika dapat dijabarkan, telah beberapa kali mengalami perubahan status diplomatik. Pada awalnya, Turki telah mengakui keberadaan Israel sebagai negara dimulai pada tahun 1948 (pada masa kekuasaan Ottoman). Dalam memulai hubungan diplomatik, adanya campur tangan Amerika Serikat dalam menguatkan hubungan diplomatik antar kedua negara. Pada tahun 1947 Turki merupakan negara yang menentang keputusan PBB untuk membagi wilayah Palestina terhadap Israel. Namun setelah dua tahun, di tahun 1949 Turki merupakan negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1950, Turki membuka hubungan diplomatik pertama kali dengan Israel, ditandai adanya penyerahan *diplomatic credentials* kepada presiden Israel pada saat itu, Chaim Weizmann dari kepala misi diplomatik Turki, Seyfullah Esin.

¹⁵ Sitaresmi S Soekanto, "Politik Luar Negeri Turki Pasca Kudeta", <http://doktor-politik-ui.net>, diakses pada 12 April 2017

Namun setelah beberapa lama dengan adanya pembukaan misi diplomasi antar kedua negara tersebut, pada tahun 1956 status diplomatik Turki yang sebelumnya berstatus *Legation* diturunkan menjadi *Charge D’Affairs*.

Adanya pertemuan secara rahasia antara Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion dan Perdana Menteri Turki Adnan Menderes, pada tahun 1958 dalam membahas Pakta Peripheral. Adanya beberapa kampanye, dan pembahasan mengenai pertukaran informasi antar kedua negara termasuk intelijen dan militer dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari pertemuan ini, memungkinkan untuk Turki menaikkan level diplomatiknya dari yang sebelumnya *Charge D’Affairs*, kembali menjadi *Legation* di tahun 1963. Kemudian pada tahun 1967, saat terjadinya Perang Enam Hari (*Six-Day War*) antara Israel dan Palestina, Turki dan beberapa negara-negara Arab mengutuk serangan tersebut dan menyerukan kepada pasukan militer Israel untuk mundur dari wilayah teritorial Palestina. Akan tetapi Turki saat mengikuti konferensi negara-negara Islam (Organisasi Kerjasama Islam), memilih untuk menentang resolusi yang menuntut untuk Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada tahun 1980, Adanya peningkatan status diplomatik antar kedua negara, dari yang sebelumnya *Legation* menjadi *Ambassador*. Kemudian pada Maret 1992, Duta Besar Turki menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Israel, Chaim Herzog di Tel-Aviv. Sebaliknya, Israel sangat memelihara hubungan baik diplomatik antara kedua negara tersebut, dimana ada Kedutaan Besar Israel di Ankara, dan adanya Konsulat Jenderal di Istanbul.

Kemudian adanya kehadiran Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2005, yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, mengunjungi Israel dan menawarkan Turki menjadi mediator dalam konflik di Timur Tengah. Tentunya hal ini menjadi sangat kontras ditengah maraknya konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tidak hanya sebatas itu, kunjungan Erdogan pada saat itu juga membahas kerjasama lainnya, terkait kerjasama militer dan juga ekonomi. Adanya tanggapan baik dari Menteri Luar Negeri Israel yang menyatakan bahwa hubungan diplomatik Isarel dengan Turki sangat sempurna. Ini menjadi pertanda bahwa kedua negara tersebut sangat menjaga hubungan diplomatiknya.

Akan tetapi pada musim dingin di akhir tahun 2008, hubungan kedua negara tersebut mulai sedikit merenggang. Hal ini diawali dengan Turki menghentikan kerjasama militer antara Turki dan Israel, dalam latihan gabungan Anatolian Eagle. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan bahwa Turki tidak lagi dapat menjadi negara mediator. "Turkey can't be [an] honest broker", dari konflik Suriah dan Israel. Oleh sebab itu, Turki menghentikan latihan militer dengan Israel.

Kemudian pada awal tahun 2009, pada saat Turki mengikuti Konferensi Ekonomi Dunia, Turki mengecam keras adanya penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Pada saat itu, Erdogan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel salah, Erdogan menyatakan "I find it very sad that people applaud what you said. You killed people. And I think that it is very wrong." Pernyataan tersebut disampaikan didepan Presiden Peres.

Dari beberapa kejadian yang menyebabkan hubungan diplomatik Turki dan Israel merenggang, terdapat satu puncak tragedi yang membuat hubungan kedua negara tersebut semakin tidak harmonis. Pada tanggal 31 Mei 2010, Angkatan Laut Israel menyerang kapal perdamaian Turki, Mavi Marmara dan menyebabkan banyaknya korban sipil Turki maupun aktivis dari beberapa negara lainnya. Erdogan menyebut bahwa serangan tersebut merupakan sebuah “Teror Negara”, dan memanggil langsung Duta Besar Turki di Israel serta meminta Duta Besar Israel untuk memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. Setelah adanya insiden tersebut, Turki langsung menanggukkan segala bentuk kerjasama bilateral baik yang sedang dilakukan, maupun yang akan dilakukan. Pada tanggal 2 September 2011, Turki langsung menurunkan status diplomatiknya dengan Israel menjadi tingkat sekretaris dua, setelah adanya laporan dari PBB mengenai insiden Mavi Marmara¹⁶. Dengan adanya penangguhan kerjasama dan penurunan status diplomatik antara Turki dengan Israel, tidak semata-mata membuat warga Turki mendukung keputusan tersebut. Kemal Kilicdaroglu, pemimpin kelompok oposisi Turki, sangat mengecam dengan keputusan tersebut. Sementara Faruk Logoglu, seorang wakil ketua oposisi Partai Republik Rakyat, juga mengkritik Erdogan dalam penangguhan hubungan diplomatik dengan Israel.

¹⁶Rehza Pahlevi, Kebijakan Turki Memutus Kerjasama Militer Dengan Israel Pada Era Pemerintahan Erdogan, Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya

Turki merupakan negara di Timur tengah yang mengecam atas blokade yang dilakukan oleh Israel di kawasan Gaza. Hal tersebut menjadikan Turki harus mengambil peran atas perlakuan Israel terhadap Palestina, dengan mengirimkan bantuan ke Palestina. Akan tetapi sebaliknya, karena adanya kekhawatiran yang tinggi dari Israel terhadap bantuan-bantuan yang datang, maka Israel memblokade wilayah Palestina dari kiriman-kiriman bantuan yang ada. Adapun dampak dari blokade ini, beberapa usaha bantuan kemanusiaan terhenti, bahkan diserang oleh militer Israel, termasuk pelayaran kemanusiaan Turki Mavi Marmara. Dari penyerangan yang dilakukan, pemerintah Israel enggan untuk meminta maaf dan hal ini menjadikan hubungan diplomatik Turki dengan Israel semakin merenggang.

Seperti yang diketahui bahwa Turki merupakan satu-satunya negara sekutu Israel di wilayah Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, Turki merupakan satu-satunya negara Islam yang menmbangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dari sini dapat dimengerti hubungan diplomatik Turki dengan Israel banyak diperdebatkan dan membuat beberapa negara di Timur Tengah sedikit mengecam atas kerjasama dari kedua negara. Akan tetapi, adanya hubungan diplomatik yang dibangun oleh Turki dengan Israel tidak semata-mata hanya sebatas kerjasama politik maupun ekonomi. Turki telah menyiapkan beberapa strategi atas kerjasama yang dibangun dengan Israel.

Setelah beberapa tahun hubungan diplomatik Israel merenggang, pada bulan Desember 2016, kedua negara sepakat untuk menggelar pertemuan rahasia, dan memulai pendekatan kembali. Pertemuan ini pada awalnya telah dibahas sebelumnya pada konferensi tingkat tinggi di Jenewa pada bulan Februari 2016. Perdana Menteri Turki saat itu (Ahmet Davutoglu) mengatakan bahwa pertemuan dengan perwakilan pemerintahan Israel telah beberapa kali dilaksanakan¹⁷. Ini merupakan satu sinyal bahwa hubungan diplomatik Turki dengan Israel akan segera diperbaiki. Adanya tawaran pemulihan hubungan diplomatik ini kemudian dibahas di internal kedua negara. Adanya tawaran-tawaran yang diajukan oleh Turki dalam pemulihan hubungan diplomatik Turki, mulai dilakukan oleh Israel. Salah satunya adalah pengajuan permintaan maaf dan ganti rugi atas korban penyerangan Kapal Mavi Marmara. Walau terdapat satu ajuan Turki kepada Israel untuk membuka blokade di Gaza yang masih belum dilakukan oleh Israel.

C. Kerjasama Militer dan Ekonomi Turki dan Israel

1. Kerjasama Militer

Dapat diketahui bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Adanya kerjasama dengan negara lain harus dilakukan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, baik itu politik, ekonomi, ataupun pertahanan. Dalam hal ini, Turki harus memperbanyak “mitra” dalam hal kerjasama, terutama ekonomi dan militer. Israel merupakan satu-satunya negara

¹⁷ Perbaiki Hubungan Diplomatik, Turki dan Israel Lanjutkan Pembicaraan, <http://internasional.kompas.com>, diakses 13 April 2017

kontroversial yang menjadi mitra dekat Turki dalam hal ini. Dalam hal militer, pemerintah Turki sebelumnya telah menyetujui adanya kerjasama pelatihan militer atau yang disebut dengan *Military Training Cooperation Agreement* (MTCA). Adapun pelatihan militer ini disepakati pada bulan Februari 1996, dan ini merupakan awal mula dari hubungan baik Turki dengan Israel. Pelatihan ini memungkinkan untuk kedua negara melakukan latihan terbang angkatan udara yang melewati batas-batas negara selama empat kali setahun. Setelah adanya pelatihan angkatan udara, MTCA ini memungkinkan untuk berlanjut ke pelatihan angkatan laut bahkan darat, di kedua negara.¹⁸

Dari adanya pelatihan angkatan bersenjata (MTCA), kerjasama berlanjut dengan adanya keingingan dalam mitra industri pertahanan yang kemudian ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerjasama industri pertahanan, atau yang disebut dengan *Defence Industry Cooperation Agreement* (DICA). Adapun kerjasama yang industri pertahanan ini dilakukan setelah enam bulan dari penandatanganan MTCA. Kedua kerjasama tersebut kemudian membuat hubungan diplomatik Turki dan Israel semakin baik.

Military Training Cooperation Agreement adalah kesepakatan ketiga kalinya yang dibuat antara Turki dengan Israel, setelah adanya Kesepakatan Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Secrecy Agreement*) pada bulan Maret 1994, serta adanya Note Kesepahaman untuk Pelatihan Pilot (*Memorandum of Understanding for the training of pilots*) pada September 1995. Berdasarkan

¹⁸ Amalia Putri Handayani, "Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel Tahun 2010", *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012

kerjasama MTCA mempunyai tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan dapat membuat kedua negara menjadi mitra yang baik kedepannya.

Setelah tercapainya kerjasama MTCA, selanjutnya pada tanggal 7 Januari kedua negara sepakat untuk melakukan pelatihan gabungan dalam meningkatkan keamanan strategis Turki maupun Israel. Kemudian kerjasama ini juga dilakukan dalam membuat hubungan diplomatis kedua negara, untuk saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya dalam kerjasama militer, pesawat tempur F-16 Israel pertama kali mengunjungi Turki dalam hal latihan militer.

Dua minggu setelah kunjungan Israel, Turki juga melakukan kunjungan balasannya di Israel. Adapun dampak dari kerjasama militer dalam pelatihan terbang antar kedua negara, sangat menguntungkan bagi Israel, mengingat kawasan Israel yang sangat kecil dan sulit untuk melakukan pelatihan angkatan udara. Oleh sebab itu, Israel sangat memanfaatkan momentum ini, mengingat Israel dapat menggunakan wilayah Turki untuk latihan angkatan udara Israel sendiri. Kemudian kedua negara meningkatkan perwakilan militer di masing-masing ibu kota. Contohnya pada penempatan atase militer Turki di Tel Aviv, dan begitu juga sebaliknya. Kerjasama ini semakin memeplihatkan bahwa kedua negara sama-sama menikmati kerjasama militer yang dilakukan, dan membawa dampak baik terhadap Turki maupun Israel.

Kemudian, dengan adanya MTCA tidak hanya dalam hal peningkatan militer saja, tetapi juga mengatur untuk pertukaran delegasi militer, latihan gabungan angkatan udara dan laut hingga pembahasan kerjasama pertahanan.

Adapun dari MTCA, Turki mendapatkan bantuan senilai \$ 650 dari Israel, dalam memperbaharui pesawat tempur F-4 Phantom milik Turki. Kesepakatan untuk bantuan ini sempat terhenti sebelumnya dan dilanjutkan kembali pada bulan Desember 1996, yang sekaligus juga memperbaiki alat-alat navigasi pesawat tempur F-4 Phantom Turki, instalasi sistem avionik canggih seperti radar dan kemampuan *electronic warfare*.¹⁹

Dalam hal pemenuhan alat-alat militer Turki, Turki telah menyerahkannya terhadap satu perusahaan milik Israel. Perusahaan tersebut telah berhasil memenangkan tender senilai 668 juta dolar Amerika Serikat, untuk memperbaharui 170 tank M60. Kemudian pada tahun 2005, ada satu proyek pembuatan 10 pesawat tanpa awak dan peralatan pengintai yang dipimpin oleh *Israel Aerospace Industries*. Israel juga membantu pengadaan militer Turki dengan menjual peralatan elektronik dan roket ke Turki.²⁰ Kerjasama militer Turki dan Israel kemudian berlanjut dengan mengadakan latihan perang yang juga terdapat Amerika Serikat didalamnya, yang disebut dengan latihan perang *Reliant Mermaid X*, di kawasan Mediterania. Adapun tujuan dari latihan perang ini untuk koordinasi dalam pencarian dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Latihan perang *Reliant Mermaid X* ini melibatkan delapan kapal perang, empat helikopter dan tiga pesawat terbang untuk operasi penyelamatan.

Setelah melakukan kerjasama militer dan Israel menjadi mitra yang baik didalamnya, kerjasama antar kedua negara tersebut berhenti pada saat adanya

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

penyerangan terhadap kapal bantuan Turki Mavi Marmara pada tanggal 31 Mei 2010. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa didalam kapal Mavi Marmara terdapat aktivis Turki dan beberapa aktivis dunia lainnya yang menjadi korban. Adapun hasil dari penyerangan yang dilakukan oleh Israel tersebut menyebabkan hubungan diplomatik Turki dengan Israel menjadi lebih buruk.

Deputi Perdana Turki Bulent Arinc mengatakan bahwa pemerintah Turki telah memutuskan dan juga membatalkan tiga latihan militer dengan Israel.²¹ Keputusan tersebut diambil karena protes Turki atas penyerangan kapal bantuan Turki Mavi Marmara, untuk Gaza. Pada saat itu, Recep Tayyip Erdogan yang menjabat sebagai perdana menteri sedang sedang kunjungan kenegaraan di Amerika Latin, saat terjadinya penyerangan kapal Mavi Marmara. Bulent Arinc juga menyatakan bahwa saat itu Erdogan langsung membatalkan kunjungannya dan kembali ke Turki saat mendengar adanya penyerangan tersebut.

2. Kerjasama Ekonomi

Di kawasan Mediterania, Turki dan Israel merupakan dua negara yang saling bertolak belakang. Baik dari pemahamannya, penduduknya, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kedua negara saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan negaranya, termasuk ekonomi. Israel merupakan mitra ekonomi Turki. Walaupun banyak yang mengecam kerjasama ini, akan tetapi Turki menyadari bahwa Israel merupakan mitra yang baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi Turki sendiri.

²¹ Ibid

Dalam kerjasama Turki dengan Israel terdapat ekspor dan impor sumber daya alam yang baik antar kedua negara. Berikut adalah data statistik kerjasama ekonomi (ekspor dan impor) antara Turki dan Israel dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Tabel 2.1
Bilateral Trade Statistics

YEAR	EXPORT	IMPORT	VOLUME	BALANCE
2010	2080	1360	3440	720
2011	2391	2057	4448	334
2012	2330	1710	4040	619
2013	2650	2418	5068	232
2014	2750	2680	5359	63
2015	2698	1672	4370	1026

Sumber: Diolah dari Kementerian Ekonomi Turki

Melalui data statistik tersebut dapat diketahui sebenarnya dari tahun ke tahun kerjasama ekonomi atau perdagangan yang dilakukan oleh Turki dan Israel mengalami peningkatan. Pertukaran sumber daya alam antar kedua negara tersebut meliputi pertambangan baik itu besi dan baja, alat-alat berat seperti mesin-mesin elektrik, minyak, plastik dan lain sebagainya.²² Kemudian Turki dan Israel juga pernah mengadakan pertemuan ekonomi yang disebut dengan Turkey-Israel Joint Economic Commission yang diadakan di Ankara pada tanggal 24 November 2009. Hal ini menandakan bahwa kedua negara memiliki hubungan yang baik dalam hal kerjasama ekonomi.

²² Economic and Commercial Relations with Israel, <http://www.mfa.gov.tr/economic-and-commercial-relations-with-israel.en.mfa>, diakses pada 19 April 2017